



PERAN UNICEF DALAM PROSES *DISARMAMENT, DEMOBILIZATION, REINTEGRATION* PRAJURIT ANAK PASCA PERANG SIPIL DI CHAD

Kania Farisa Nadila

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Websiter: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is inspired by the civil war that took place in Chad in 2005 until 2010. This war caused humanitarian impacts, one of which is the recruitment of child soldiers. The child soldiers were recruited by both the government and the opposition armed forces. The recruitment of child soldiers is listed as a war crime as explained in the Convention on the Rights of the Child, which clearly explains that children under 18 years of age are not allowed to be involved directly in wars as soldiers or combatants. To mitigate and prevent this issue from happening again, the children who are already in the armed forces have to be released through Disarmament Demobilization Reintegration (DDR) process. Unfortunately, Chadian government was unable to handle this by itself since the conflict was still ongoing in that country, and needed help from an organization or institution to go through the DDR process. To explain this situation, neoliberal institutionalism is best suited since its main paradigm is that a country can solve its problem by seeking help from a certain institution, be it old or new. UNICEF, as the only UN body that focuses on children, helped the government of Chad with the DDR process by making an agreement upon this issue. Through this process, UNICEF was able to help advocating the release of more than 1000 child soldiers, help them through the transition and adaptation phase, provide them with accessible healthcare as well as education, and identify the children before they were reintegrated with their families.

Keywords: *child soldiers, civil war, Chad, UNICEF, disarmament, demobilization, reintegration*

Pendahuluan

Chad merupakan sebuah negara di Afrika Tengah yang merupakan bekas jajahan Perancis. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1960, Chad mulai mengalami konflik internal akibat perebutan kekuasaan antara dua etnis utama di negara tersebut, yaitu etnis Arab-Muslim dari wilayah utara dan etnis Sara dari wilayah selatan. Chad terkenal dengan sistem politiknya yang didominasi oleh *the rule of gun*, di mana pemerintah akan lebih memilih untuk melakukan konfrontasi militer atau menyuap pemimpin kelompok lawan daripada bernegosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemerintah Chad memarginalisasi oposisi politiknya dan seringkali menghindar untuk menyatakan apa yang sebenarnya menjadi akar dari konflik di negara tersebut, yaitu otoritarianisme (Enough Team 2009). Pada tahun 1996, Chad akhirnya dapat melaksanakan pemilihan umum presiden secara demokratis untuk pertama kalinya. Pemilu ini dimenangkan oleh Idriss Deby, yang partai politiknya berhasil menggulingkan kekuasaan presiden sebelumnya, Hassan Habre, yang terkenal akan kebijakannya yang kejam.

Setelah memerintah selama dua periode, Presiden Deby merasa ingin berkuasa kembali. Pada tahun 2005, Deby mengusulkan amandemen undang-undang yang mengizinkan Presiden Chad untuk berkuasa selama tiga periode berturut-turut (Child Soldiers International 2008). Hal ini memicu amarah pihak oposisi yang memang menginginkan Deby turun karena adanya dugaan korupsi pipa-pipa minyak. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun pipa diduga digunakan Deby untuk membeli persenjataan guna melawan oposisi jika sewaktu-waktu mereka menyerang (Schoppert, historycollection.co n.d.). Pihak oposisi, yang menamakan diri mereka *Front Uni pour le Changement* (FUC), akhirnya menyerang daerah Adre pada akhir 2005, menandai dimulainya perang sipil Chad. Kondisi perang ini diperparah dengan adanya *Proxy War* antara Chad dan Sudan. Pada awal 2006, Pemerintah Sudan menyatakan dukungan terhadap pemberontak Chad (Human Rights Watch 2007), yang dibalas Pemerintah Chad dengan mendukung pemberontak Sudan (Jonasen 2009). Di tengah perang yang berkecamuk, Deby terpilih lagi menjadi presiden untuk ketiga kalinya pada Mei 2006. Untuk memperbaiki citranya sebagai presiden, Deby membuat perjanjian damai antara Pemerintah Chad dengan FUC. Perjanjian ini membuat kondisi cenderung membaik pada 2007. Di tahun tersebut pula, Pemerintah Chad menandatangani Perjanjian 13 Agustus 2007 dengan pemberontak Chad., yang sayangnya tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya (Khabure 2013).

Pada tahun 2008, serangan kembali dilancarkan oleh para pemberontak di N'Djamena dengan tujuan untuk mengambil alih istana kepresidenan (onwar.com n.d.). Serangan ini membuat Uni Eropa menurunkan pasukan penjaga perdamaannya pada Februari 2008, disusul pasukan penjaga perdamaian PBB, MINURCAT, pada pertengahan tahun tersebut. Semenjak pertengahan 2009, pemberontak tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Chad. Hal ini dimanfaatkan Presiden Deby untuk mengembalikan citra dan kredibilitasnya baik dalam kancah nasional maupun internasional (Khabure 2013). Pada 15 Januari 2010, pemerintah Chad dan Sudan menandatangani perjanjian damai di Darfur. Perjanjian ini merevitalisasi hubungan antara kedua negara dan menandakan berakhirnya *proxy war* antara Chad dan Sudan. Meskipun perjanjian ini tidak benar-benar mengakhiri konflik sipil berkepanjangan di Chad, perjanjian ini menandai berakhirnya perang sipil selama lima tahun yang ditunggangi *proxy war* Chad dan Sudan. Pengaruh dari perjanjian ini terhadap kondisi internal Chad adalah penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB dari wilayah Chad serta komitmen pemerintah Chad untuk mengadakan pemilihan umum pada tahun mendatang (Human Rights Watch 2007).

Fenomena yang menjadi sorotan sebagai salah satu dampak perang sipil ini adalah perekrutan prajurit anak. Terhitung ada sekitar 7,000-10,000 anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata pemerintah maupun oposisi. *Armee Nationale Tchadienne* (ANT) atau Tentara Nasional Chad mulai merekrut prajurit anak semenjak musim gugur 2006 (Nwoko 2011). Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun ditugaskan untuk membantu tugas prajurit dewasa, seperti membuat teh, mencari air, mengumpulkan kayu bakar, serta menggembala ternak. Sementara anak-anak yang sudah lebih besar ditugaskan untuk menjaga ibukota (Child Soldiers International 2008). Menurut Schauer dan Elbert (2010), faktor-faktor yang menyebabkan perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata dapat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor demografis, faktor psikologis, dan faktor ekonomi. Faktor pertama yaitu faktor demografis, menjelaskan bahwa negara-negara berkembang yang cenderung miskin, di mana banyak anak-anak dan remaja yang kurang mendapat perlindungan, akan mudah direkrut ke dalam kelompok bersenjata. Faktor psikologis merupakan faktor yang paling sering dimanfaatkan oleh para petinggi militer. Sifat anak-anak yang cenderung penurut, memiliki daya berjuang dan daya bertahan. Dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch pada tahun 2007, seorang anggota senior *Armee*

Nationale Tchadienne mengungkapkan bahwa anak-anak merupakan prajurit yang ideal karena mereka tidak mengeluh, tidak mengharap untuk dibayar, dan jika mereka disuruh membunuh, mereka akan membunuh (Jonasen 2009). Faktor ekonomi di sini merupakan faktor yang berasal dari kelompok bersenjata itu sendiri, karena umumnya kelompok bersenjata dan/atau pemberontak berskala kecil di negara berkembang tidak memiliki cukup uang untuk membayar prajurit dewasa yang mengharapkan upah dari jasanya, maka mereka lebih memilih untuk merekrut anak-anak yang biayanya jauh lebih rendah daripada prajurit dewasa. Dalam kasus Chad, ANT merupakan tentara nasional yang tidak efisien dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Sementara, mereka dihadapkan dengan situasi perang sipil di mana mereka harus melawan beberapa kelompok pemberontak sekaligus. Oleh karena itu, mereka merekrut anak-anak untuk masuk dalam kelompok bersenjata mereka sebagai bentuk pertahanan diri (Nwoko 2011).

Perekrutan prajurit anak tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata pemerintah Chad, namun juga oleh kelompok bersenjata pemberontak. FUC merupakan kelompok pemberontak yang paling sering dilaporkan melakukan perekrutan prajurit anak. FUC melakukan perekrutan di wilayah timur laut Chad di akhir 2006. Dalam laporan Child Soldiers International (2008), dikatakan bahwa FUC telah melakukan penculikan pada Januari 2006 hingga Mei 2007 terhadap anak-anak di wilayah Guereda saat anak-anak tersebut sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Faktor pendorong perekrutan anak-anak ke dalam kelompok pemberontak utamanya dapat dibagi menjadi dua, faktor psikologis dan faktor ekonomi. Dalam faktor psikologis, berbeda dari anak-anak yang direkrut ANT, anak-anak yang direkrut FUC “dimanipulasi” secara psikologis. Di Chad sendiri, sebagian anak masuk secara sukarela ke dalam FUC, dengan alasan ingin membalas dendam atas kematian anggota keluarga mereka yang dibunuh oleh anggota kelompok bersenjata Zaghawa (Child Soldiers International 2008). Hal ini membuktikan bahwa motif balas dendam yang ditanamkan oleh para petugas senior dari kelompok bersenjata ke dalam pikiran anak-anak mampu membuat mereka mau bergabung ke dalam sebuah kelompok bersenjata. Faktor ekonomi, seperti halnya dalam perekrutan oleh ANT, menjadi faktor pendorong besar bagi anak-anak untuk masuk ke dalam kelompok bersenjata. Kemiskinan dan sulitnya akses pendidikan membuat mereka ingin pergi dari lingkungan yang mereka tinggali (Human Rights Watch 2007). Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan akan mudah terperdaya oleh iming-iming uang yang ditawarkan jika mereka bergabung dalam kelompok bersenjata. Rendahnya tingkat pendidikan yang mereka peroleh juga menjelaskan mengapa anak-anak ini sangat mudah diperdaya. Seorang anak bahkan mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ia mau bergabung dalam FUC karena ia dijanjikan sejumlah uang yang dapat ia peroleh jika FUC berhasil merebut kekuasaan dari tangan pemerintah (Human Rights Watch 2007).

Pembahasan

Perekrutan prajurit anak merupakan salah satu bentuk kejahatan perang. Anak-anak dalam perang dilindungi oleh keempat konvensi Jenewa beserta kedua protokol tambahannya, *Conventions on the Rights of the Child* tahun 1989 dan protokol tambahannya tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2000, serta Pasal 8 Statuta Roma tentang *International Criminal Court* yang menetapkan bahwa merekrut atau menggunakan anak di bawah usia lima belas tahun untuk ikut serta secara aktif dalam konflik adalah sebuah kejahatan perang (Ramdhany, Aktivitas Gerakan dalam Sengketa 2009). Chad sebenarnya sudah menandatangani *Conventions on the Rights of the Child* pada tahun 1990, dan protokol tambahannya tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata di tahun 2002. Sayangnya, baik tentara nasional maupun kelompok pemberontak Chad tetap saja merekrut anak-anak sebagai bagian dari mereka (Jonasen

2009). Untuk mengatasi masalah perekrutan prajurit anak, dibutuhkan suatu proses yang membantu anak-anak yang sudah berada dalam kelompok bersenjata untuk bebas dan kembali ke masyarakat. Proses ini dinamakan *Disarmament, Demobilization, Reintegration* atau DDR. DDR merupakan serangkaian proses yang dilakukan pada masa *peacebuilding*. DDR merupakan proses demiliterisasi para personil militer kelompok bersenjata pemerintah maupun non pemerintah, dengan melakukan pengurangan kepemilikan dan penggunaan senjata api, membubarkan kelompok-kelompok bersenjata non pemerintah, mengembalikan pelayanan keamanan negara, serta membantu para mantan kombatan untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat (Ball dan van de Goor 2006). Menurut *United Nations DDR Resource Centre*, tujuan DDR adalah untuk membantu mengembalikan keamanan dan stabilitas di wilayah pasca perang supaya pemulihan dan pembangunan dapat berjalan kembali (Knight 2008).

DDR tidak hanya dilakukan kepada prajurit dewasa, namun juga kepada anak-anak yang terlibat dalam kelompok-kelompok bersenjata. Anak-anak yang direkrut secara ilegal, yang masa kecilnya direnggut secara paksa, harus diberikan pendampingan, perlindungan, serta dukungan untuk bereintegrasi, untuk kembali ke masyarakat, dan untuk kembali belajar. Mereka perlu diberi Anak-anak tersebut juga harus diberi pendampingan dalam mempertahankan hidup mereka (Specht 2009). Proses DDR kepada prajurit anak dipisahkan dari program DDR prajurit dewasa karena anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Selain itu, program DDR formal biasanya tidak mengikutsertakan anak-anak karena beberapa alasan, antara lain karena para prajurit anak tidak dimasukkan ke dalam kebijakan dan program DDR atau karena cakupan program DDR formal terbatas hanya untuk prajurit dewasa (Lorey 2001). Dalam kasus Chad, pasukan penjaga perdamaian ditarik sebelum sempat menyelesaikan mandatnya sehingga proses *peacebuilding* tidak dapat dilaksanakan, sementara pemerintah Chad tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan DDR oleh mereka sendiri. Maka dari itu, perlu bantuan suatu badan atau organisasi khusus yang dapat membantu pemerintah Chad dalam hal ini.

Hal ini bersependangan dengan teori neoliberal institusionalisme, yang menganggap bahwa negara perlu kerjasama internasional untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam neoliberal institusionalisme, institusi dianggap sebagai mediator, penghubung dan pemelihara kerjasama (Nuruzzaman n.d.), juga sebagai pemberi informasi, penekan komitmen, koordinator, serta fasilitator operasi resiprositas (Keohane dan Martin 1995). Maka dari itu, negara dapat menggunakan suatu institusi internasional dalam menyelesaikan masalah. Negara dapat menggunakan institusi lama dengan memperluas cakupannya, atau mendirikan institusi baru dengan cakupan khusus (Stein 2008). Sebagai perwujudan dari kerjasama dengan institusi, pemerintah Chad menandatangani perjanjian dengan UNICEF untuk melakukan DDR kepada prajurit anak. Proses DDR ini dikenal dengan nama *the national program on the release, temporary care, and reinsertion of children associated with armed forces or group* atau RRR Program (Child Soldiers International 2012). Perjanjian antara pemerintah Chad dan UNICEF ini memberikan UNICEF akses ke pusat pelatihan ANT di Mongo, di mana mereka langsung berhasil mengidentifikasi kurang lebih 383 prajurit anak (Human Rights Watch 2007).

Sayangnya hanya 986 anak yang berhasil dibebaskan dan melalui proses DDR dari tahun 2007-2009. Padahal pada September 2007 diperkirakan ada sekitar 7,000-10,000 anak yang terintegrasi dalam kelompok bersenjata (School For A Culture of Peace 2009). Total anak yang berhasil dibebaskan dan melewati proses DDR pada tahun 2007 tercatat sebanyak 496 anak, sementara pada tahun 2008 hanya sebanyak 59 anak yang berhasil dibebaskan maupun melewati proses DDR. Penurunan angka dari tahun 2007 ke 2008 disebabkan adanya serangan ke ibukota N'Djamena yang ditujukan untuk Presiden Deby pada akhir 2007. Serangan ini menyebabkan banyaknya anak-anak yang kembali

digunakan sebagai prajurit (Leclerq, irinnews.org 2009). Hingga Juli 2009, sebanyak 413 anak berusia antara 8 dan 18 tahun dilepaskan dari FUC di wilayah Mongo, 159 di antaranya dipindahkan ke pusat transisi di Abeche dan N'Djamena, sementara 254 sisanya dipindahkan ke pusat transisi sementara di Mongo, sebelum nantinya dipindahkan ke N'Djamena (Human Rights Watch 2007). Setelah perang dinyatakan berakhir pada awal 2010, masih banyak anak-anak yang tergabung dalam kelompok bersenjata pemerintah maupun non pemerintah. Pada dilaporkan bahwa sebanyak direkrut oleh kelompok bersenjata, padahal perang sipil yang berlangsung selama lima tahun telah dinyatakan selesai. Sayangnya tidak ada jumlah pasti berapa banyak anak yang masih berada dalam ANT, meskipun ada kemungkinan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang direkrut pada tahun 2006-2009 masih berada dalam ANT. Untuk mengatasi hal ini, UNICEF melanjutkan program DDR yang telah berjalan selama perang berlangsung.

Pada tahun 2011, pemerintah Chad menandatangani *Action Plan* untuk anak-anak yang terlibat dalam kelompok bersenjata, dengan tujuan untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam kelompok bersenjata (Child Soldiers International 2013). Dalam menjalankan *Action Plan* ini, pemerintah Chad dibantu oleh UNICEF sebagai partner dalam pelaksanaan program DDR. Sayangnya, program NRRR mulai dihentikan pada Desember 2011 atas dasar ketidakmampuannya untuk membebaskan anak-anak dari ANT dalam jumlah yang signifikan. Meskipun begitu, UNICEF masih mengawasi perekrutan dan penggunaan prajurit anak di Chad bersama dengan partner-partnernya (Child Soldiers International 2012). Meski telah menandatangani *Action Plan* pada tahun 2012, terdata sejumlah 30 anak direkrut ke dalam kelompok bersenjata. Proses identifikasi pasca perang sempat tertunda hingga pertengahan Oktober 2012, namun UNICEF dan Kementerian Sosial Chad berhasil mengidentifikasi 24 anak di bawah umur dalam sebuah misi ke Mongo pada Juni di tahun yang sama. Pada bulan Oktober, UNICEF kembali berhasil mengidentifikasi 10 orang anak di daerah Moussouro. Anak-anak tersebut dibawa ke N'Djamena untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial Chad pada November 2012 sebelum akhirnya dipersatukan kembali dengan keluarga mereka pada Januari 2013 (Child Soldiers International 2013).

Dalam proses DDR, UNICEF berfokus pada tahap *demobilization* dan *reintegration*, karena pada proses *disarmament* dibutuhkan keahlian khusus dalam menangani senjata. Anak-anak yang dibebaskan dari kelompok bersenjata sudah dilucuti dari segala senjata dan senapan yang dibekali kepada mereka, setelah itu barulah mereka masuk ke dalam proses *demobilization* dan *reintegration* yang dijalankan UNICEF. Dalam tahap *demobilization*, anak-anak yang telah dibebaskan ditampung di pusat-pusat transisi selama kurang lebih 3 bulan. Di pusat transisi ini, anak-anak diberi layanan nutrisi, kesehatan, dan psikososial (Walther, unicef.org 2009). Di sini, mereka juga belajar bagaimana cara hidup sebagai masyarakat sipil dan beradaptasi dengan dunia non-militer (Leclerq, irinnews.org 2009). Anak-anak ini juga kemudian dicari asal usulnya supaya nantinya dapat direintegrasikan dengan keluarga mereka (Zulfiqar, unicef.org 2010). Sementara dalam tahap *reintegration*, anak-anak diberi pendidikan formal dan keterampilan. Anak-anak yang sudah lebih besar difokuskan ke pendidikan keterampilan, seperti menjahit dan memasak, dan nantinya akan dipersilakan bekerja atau diberikan modal untuk membuka usaha kecil (Leclerq, irinnews.org 2009). Anak-anak yang sudah teridentifikasi dalam tahap sebelumnya dibantu dilacak keberadaan keluarganya. Sebelum berakhirnya program NRRR, UNICEF menjadi tangan pertama yang mengantarkan anak-anak kembali ke pelukan orangtuanya. Namun setelah program NRRR berakhir pada Desember 2011, UNICEF hanya berperan sebatas pengidentifikasi anak-anak sebelum akhirnya diserahkan kepada Kementerian Sosial Chad untuk diantarkan pulang ke keluarga masing-masing anak.

Pelaksanaan DDR oleh UNICEF bukan tanpa hambatan dan tantangan. Dalam tahap *demobilization*, hambatan terbesar pertama yang dihadapi UNICEF adalah perekrutan yang masih berlanjut dalam tubuh para kelompok bersenjata. Pada tahun 2009, ANT dan kelompok bersenjata lainnya kembali merekrut dan menggunakan tentara anak. MINURCAT mendokumentasikan setidaknya 26 kasus perekrutan di tahun tersebut, 19 di antaranya masih tergabung dalam kelompok militer hingga April 2010 (Ploch 2010). Bahkan setelah ditandatangani Action Plan 2011, ANT masih terdaftar sebagai salah satu pihak perekrut prajurit anak pada tahun 2013 (Pascal dan Moreno, unicef.org 2014). Kedua adalah kurangnya dukungan ANT. Pemerintah Chad masih sering menyangkal keberadaan prajurit anak di kelompok bersenjata mereka. Salah satu dari anggota ANT yang terlibat dalam perekrutan, bahkan menyebutkan bahwa personil militer Chad akan mencari cara untuk menyembunyikan anak-anak dari upaya demobilisasi. Anak-anak tersebut ditempatkan di garis depan dan tempat-tempat lain yang sulit dijangkau demi menghindari mereka dari proses DDR (Human Rights Watch 2007) Yang ketiga adalah banyaknya anak-anak tanpa identitas. Hal ini menyulitkan proses demobilisasi dan pembebasan karena tidak adanya bukti hukum usia mereka.

Sementara dalam tahap *reintegration*, hambatan dan tantangan pertama yang dihadapi UNICEF adalah psikologi anak. Anak-anak yang terbiasa memegang senjata merasa kesulitan untuk hidup dengan tangan kosong. Mereka yang terlatih dan terbiasa membunuh sulit mengatasi trauma psikososial dan beradaptasi dengan kehidupan baru mereka (Zulfiqar, youtube.com 2010). Menurut Schauer dan Elbert (2010), anak-anak mantan kombatan akan lebih mudah mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD). Trauma yang didapat anak-anak akan lebih sulit dihilangkan karena apa yang mereka pelajari dalam masa kecilnya adalah cara melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Yang kedua adalah isu kriminalitas yang menghantui anak-anak tersebut. Selama dalam kamp militer, mereka dipaksa melakukan tindak kriminal. Seorang anak lainnya mengaku dipaksa untuk membunuh tanpa ampun serta memperkosa wanita untuk membuktikan bahwa mereka kuat (Pascal dan Moreno, unicef.org 2014). Menurut Duthie dan Specht (2010) ada tiga isu kriminalitas menyangkut anak-anak, pertama apakah anak-anak harus diadili; kedua, bagaimana anak-anak seharusnya diperlakukan apabila mereka diadili atau berperan sebagai saksi mata; dan ketiga, adakah efek dari mengadili mereka yang bertanggung jawab atas perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata. Sejauh ini, masih dipertimbangkan apakah anak-anak yang telah melakukan tindak kriminal dapat dijatuhkan hukuman, karena mereka juga merupakan korban dari kejahatan perang yang dilakukan oleh otoritas. Yang terakhir adalah ketidakstabilan negara, karena konflik internal terus berkecamuk dalam tubuh Chad. Hal ini seakan menimbulkan pertanyaan apakah anak-anak yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat dapat direkrut lagi sewaktu-waktu.

Proses DDR yang dilakukan UNICEF dilakukan bukan tanpa bantuan dari negara dan organisasi donor. Dalam laporan Human Rights Watch (2007), ada dua negara donor utama yang membantu proses DDR UNICEF, yaitu Perancis dan Amerika Serikat. Perancis, sebagai negara yang pernah mengolonialisasi Chad, memiliki pasukan yang khusus diterjunkan di negara tersebut. Namun Perancis dengan tegas mengatakan akan menarik pasukannya dari Chad apabila Chad tidak mengambil langkah konkrit untuk melakukan demobilisasi prajurit anak. Perancis juga mengadakan konferensi yang menghasilkan Paris Principles, di mana negara-negara yang terlibat, termasuk Chad, berkomitmen mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Sementara, Amerika Serikat membantu dengan mengeluarkan Child Soldiers Prevention Act of 2007. Isi undang-undang ini adalah negara-negara yang terlibat dalam perekrutan atau penggunaan prajurit anak tidak dapat ikut serta dalam lima kategori pendanaan militer,

pelatihan militer, atau transfer persenjataan Amerika Serikat. Chad merupakan salah satu dari delapan negara yang paling mungkin terpengaruh legislasi tersebut. Ancaman Amerika Serikat ini merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah Chad mengadakan program DDR dengan UNICEF. Selain negara-negara donor, ada pula organisasi donor yang turut membantu UNICEF. Organisasi donor utama dalam proses ini adalah Care International, yang membantu UNICEF dalam menjalankan pusat transisi dan orientasi di N'Djamena (Walther, unicef.org 2009) serta membantu mengawasi jalannya situasi humaniter di negara tersebut, seperti dengan menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, serta perlindungan.

Kesimpulan

Fenomena perekrutan prajurit anak yang terjadi dalam perang sipil Chad pada tahun 2005 hingga 2010 membuat perhatian dunia cukup tersita akan isu ini. Anak-anak tidak seharusnya terlibat dalam kelompok bersenjata, sebagaimana dijelaskan dalam Convention on the Rights of the Child, bahwa perekrutan prajurit anak merupakan suatu kejahatan perang. Di Chad sendiri, ada kurang lebih 7,000 hingga 10,000 prajurit anak yang digunakan baik oleh ANT maupun FUC. Atas desakan dari Perancis dan Amerika Serikat, pada tahun 2007 pemerintah Chad bersedia menandatangani perjanjian dengan UNICEF untuk melakukan proses DDR kepada prajurit anak. Program DDR UNICEF di Chad, atau yang disebut dengan NRRR, tidak dapat melakukan *disarmament* karena UNICEF tidak memiliki kapabilitas untuk melucuti dan berurusan dengan senjata, maka dari itu, UNICEF berfokus pada tahap *demobilization* dan *reintegration*. Dalam tahap *demobilization*, anak-anak yang telah dibebaskan dari kelompok bersenjata ditampung di pusat-pusat transisi, diberi nutrisi dan layanan kesehatan, dibantu beradaptasi dengan masyarakat, serta dicari tahu asal usulnya. Sementara dalam tahap *reintegration*, anak-anak diberi pendidikan, pekerjaan, serta dikembalikan ke keluarga mereka. Sayangnya, dukungan pemerintah Chad akan proses ini masih belum maksimal, terbukti dari dibatalkannya NRRR, implementasi Action Plan yang tidak baik, dan masih adanya perekrutan prajurit anak bahkan di depan mata UNICEF.

Referensi

- Ball, Nicole, and Luc van de Goor. 2006. *Disarmament, Demobilization and Reintegration: Mapping Issues, Dilemmas and Guiding Principles*. Research Report, The Hague: Netherlands Institute of International Relations.
- Jonasen, Mary. 2009. "Child Soldiers in Chad: A Policy Window for Chad." *Intersections*: 309-329.
- Keohane, Robert O., dan Lisa L. Martin. 1995 "The Promise of Institutionalist Theory." *International Security*: 39-51.
- Lorey, Mark. 2001. *Care and Protection of Children in Emergencies: A Field Guide*. Save The Children.
- Khabure, Louise. 2013. *Societies Caught in the Conflict Trap: Regional Research Findings - Chad, Central African Republic, Sudan, South Sudan*. ACORD and CCFD-Terre Solidaire.
- Knight, W. Andy. 2008. "Disarmament, Demobilization, and Reintegration and Post-Conflict Peacebuilding in Africe: An Overview." *African Security*: 24-52.
- Leclerq, Anne Isabelle. *Instability threatens demobilisation of child soldiers*. April 16, 2009. <http://www.irinnews.org/feature/2009/04/16/instability-threatens-demobilisation-child-soldiers> (diakses pada 28 Mei 2017).
- Lorey, Mark. 2001. *Care and Protection of Children in Emergencies: A Field Guide*. Save The Children.

- Nwoko, Kenneth Chukwuemeka. 2011. "A Bleak Future, A Wasted Generation: Child Soldiers in Africa." *Africana*: 68-99.
- Nuruzzaman, Mohammed. n.d. "Liberal Institutionalism and Cooperation in the Post-9/11 World."
- Pascal, Ferso Dohou, and Manuel Moreno. "We were forced to kill", recalls child released from armed forces in Chad. Juni 30, 2014. https://www.unicef.org/emergencies/chad_73969.html (diakses pada 29 Mei 2017).
- Ploch, Lauren. 2010. *Instability and Humanitarian Conditions in Chad*. Research Paper, Washington, DC: Congressional Research Service.
- Schauer, Elisabeth, dan Thomas Elbert. 2010. "The Psychological Impact of Child Soldiering." dalam *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*, oleh E. Martz (pp 311-360). Springer Science+Business Media.
- Schoppert, Stephanie. *The Ten Most Corrupt African Dictators in Modern History*. n.d. <http://historycollection.co/ten-corrupt-african-dictators-modern-history/2/> (diakses pada 28 Februari 2016).
- Specht, Irma. 2009. "Children and DDR." Dalam *Seen, but not Heard: Placing Children and Youth on the Security Governance Agenda*, by David Nosworthy (pp 191-218). Piscataway: Transaction Publishers.
- Stein, Arthur A. 2008. "Neoliberal Institutionalism." Dalam *The Oxford Handbook of International Relations*, by Christian Reus-Smit and Duncan Snidal (pp 201-221). New York: Oxford University Press.
- Walther, Cornelia. *Despite challenges, UNICEF continues to push for release of child soldiers*. April 29, 2009. https://www.unicef.org/infobycountry/chad_49535 (diakses pada 29 Mei 2017).
- Zulfiqar, Salma. *Recovering from a child soldier's life in Chad*. Februari 12, 2010. https://www.unicef.org/wcaro/2009_3937.html (diakses pada 29 Mei 2017).
- Zulfiqar, Salma. "UNICEF: Reintegrating child soldiers in Chad." *YouTube*. Mei 28, 2010. <http://www.youtube.com> (diakses pada Oktober 21, 2016).
- . *Better Than Cure: Preventing The Recruitment and Use of Children in The Chadian National Army*. 2012. London: Child Soldiers International.
- . *Briefing on the status of implementation of the June 2011 Action Plan on children associated with armed forces and groups in Chad*. 2013. Briefing report, London: Child Soldiers International.
- . *Chad's Domestic Crisis: The Achilles Heel for Peacemaking in Darfur*. 2009. Washington, DC: Enough Project.
- . *Chadian Civil War*. n.d. <https://www.onwar.com/aced/chrono/c2000s/yr00/chadiancivilwar2005.htm> (diakses pada 17 Maret 2017).
- . *Child Soldiers Global Report*. 2008. Global Report, London: Coalition to Stop the Use of Child Soldiers.
- . "Convention on The Rights of the Child." *United Nations Human Rights*. n.d. <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> (diakses pada 15 Oktober 2015).
- . *DDR 2009: Analysis of the World's Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) Programs in 2008*. 2009. Laporan Tahunan, Barcelona: School for a Culture of Peace.
- . *Early to War: Child Soldiers in the Chad Conflict*. 2007. Human Rights Watch.